

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan mangrove merupakan sumber daya alam daerah tropis yang mempunyai potensi besar, keberadaan hutan mangrove memberikan potensi yang paling penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia, baik secara ekologi maupun secara ekonomi (Rahman *et al.*, 2024). Secara ekologi, hutan mangrove berperan sebagai habitat penting yang menyediakan tempat berlindung, sumber makanan, dan area berkembang biak bagi berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Secara ekonomi, hutan mangrove menyediakan sumber daya alam yang dapat menghasilkan berbagai produk komersial, seperti kayu untuk bahan bangunan dan hasil perikanan seperti udang yang bernilai tinggi. Selain itu, hutan mangrove juga dapat dikembangkan sebagai tempat wisata alam yang menarik dan sebagai tempat pembelajaran lingkungan serta pelatihan konservasi (Siti *et al.*, 2021).

Keberadaan hutan mangrove di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, khususnya di Kecamatan Sawo Desa Sisarahili merupakan ekosistem pesisir yang sangat penting karena berperan dalam perlindungan lingkungan, mendukung keanekaragaman hayati, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (Khairunnisa dan Abdillah, 2022). Hutan mangrove di Desa Sisarahili tidak hanya berfungsi sebagai penyangga ekosistem, tetapi juga telah berkembang menjadi destinasi wisata yang menarik minat pengunjung, sehingga berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Pengelolaan hutan mangrove di Desa Sisarahili mencerminkan model pengembangan wisata berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek konservasi lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal, dengan prinsip wisata yang berwawasan lingkungan (Yap dan Mutairi, 2025).

Pengembangan wisata hutan mangrove Desa Sisarahili, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara, telah menunjukkan kemajuan yang cukup baik sejak dimulainya pengembangan destinasi wisata tersebut pada tahun 2017 melalui forum musyawarah desa. Beberapa fasilitas telah dibangun meliputi jembatan pejalan kaki, kios souvenir, pondok apung, serta memudahkan akses dan meningkatkan kenyamanan para pengunjung. Untuk mendukung pengembangan wisata berkelanjutan, diperlukan keterlibatan dari pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam peningkatan fasilitas wisata (Utomo dan Palungan, 2023).

Keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting dalam memastikan keberlangsungan sebuah destinasi wisata, karena masyarakat lokal memiliki pemahaman yang mendalam mengenai potensi wisata di daerah (Rifda dan Kusdiwanggo, 2022). Partisipasi aktif mereka dalam pengelolaan wisata menjadi dasar konsep wisata berbasis masyarakat, yakni suatu pendekatan yang menitik beratkan pada kepemilikan, pengelolaan, serta keterlibatan langsung dari masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove melalui keterlibatan dalam tiga tahap utama yaitu, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Keterlibatan ini menegaskan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi melalui pengembangan

wisata yang berjalan dengan baik (Imanniyar dan Farida, 2021).

Permasalahan utama yang muncul adalah terjadinya perubahan pada ekosistem mangrove akibat aktivitas wisata yang tidak terkontrol. Beberapa masyarakat diketahui membuka lahan secara ilegal untuk mendirikan tempat usaha, yang mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan mangrove. Kegiatan ini berpotensi menurunkan kualitas ekosistem yang menjadi daya tarik utama wisata tersebut. Selain itu kurangnya perencanaan yang berorientasi lingkungan juga menyebabkan peningkatan limbah, pencemaran, serta gangguan terhadap habitat flora dan fauna (Yabana *et al.*, 2021). Permasalahan lainnya rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan wisata, keterlibatan masyarakat lokal belum menyentuh aspek perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga pengembangan wisata kurang mencerminkan aspirasi masyarakat setempat. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan dan resistensi sosial yang dapat menghambat keberlangsungan wisata. (Widya dan Herry, 2023).

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan memahami persepsi masyarakat terhadap pengembangan wisata mangrove, penelitian ini akan membantu mengidentifikasi sejauh mana kegiatan wisata berdampak secara ekologis dan sosial ekonomi. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan bagi pemerintah daerah, pengelola wisata dan pihak terkait dalam menyusun strategi pengelolaan wisata yang lebih inklusif, partisipasi, dan berkelanjutan. Dengan demikian kawasan mangrove dapat tetap terjaga kelestariannya dan tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Penelitian ini dibatasi pada persepsi masyarakat Desa Sisarahili terhadap dampak pengembangan wisata hutan mangrove, khususnya terhadap ekosistem, sosial ekonomi, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada persepsi masyarakat Desa Sisarahili terhadap dampak pengembangan wisata hutan mangrove, khususnya terhadap ekosistem, sosial ekonomi, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah :

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap dampak pengembangan wisata hutan mangrove terhadap ekosistem dan sosial ekonomi masyarakat?
2. Sejauh mana masyarakat Desa Sisarahili terlibat dalam pengelolaan wisata hutan mangrove?

D. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui persepsi masyarakat terhadap dampak ekosistem dan sosial ekonomi masyarakat akibat pengembangan wisata hutan mangrove.
2. Menganalisis tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan kawasan wisata hutan mangrove Desa Sisarahili.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan Manfaat:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan pelestarian ekosistem mangrove di kawasan wisata pesisir.
2. Sebagai bahan evaluasi dalam merancang pembangunan dan pengembangan wisata hutan mangrove yang berkelanjutan dan sesuai dengan persepsi serta kebutuhan masyarakat sekitar